2026

RENCANA AKSI *Pokok*



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA AKSI POKOK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2026	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tujuan : Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB Subsecktor Perikanan	%	**5.6**				**5.6**							
	Sasaran 1 :Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	ton	**5,709,493**				**5,709,493**							
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	**119**				**119**							
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Nilai	**113**				**113**							
		Angka konsumsi ikan	kg/kapita/thn	**74.70**				**74.70**							
	1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Tangkap	ton	532,015.20				532,015.20							
	1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	**Persentase peningkatan produksi nelayan perairan laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan**	**%**	**5,78**				**5,78**						Bidang Perikanan Tangkap	
	1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan12 Mil	Dok	1	-	-	-	1	Menyusun TOR dan KAK				100	Bidang Perikanan Tangkap	
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan				100		
									Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota				100		
									Merencanakan, Spesifikasi pekerjaan dan RAB				100		
									Melakukan Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja				100		
									Pelaksanaan pengadaan barang				100		
									Memonitoring Pekerjaan dan Pelaporan				100		
									Melakukan Penyerahan barang kepada kelompok penerima				100		
									Menyusun laporan kegiatan				100		
	2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	111	30	30	30	21	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				Bidang Perikanan Tangkap	
									Melakukan survey dan identifikasi lokasi	100					
									Merencanakan, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	50					
									Melakukan Persiapan lelang pekerjaan		50	75	100		
									Melelang perkerjaan		100				
									Melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan		50	75	100		
									Memonitoring Pekerjaan dan Pelaporan		50	75	100		
									Melakukan Serah Terima Pekerjaan		50	75	100		
									Menyusun laporan kegiatan				100		
	3 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	226	50	50	60	66	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Perikanan Tangkap	
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
									Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	70	30				
									Melakukan verifikasi dan koordinasi lokasi di Kab/Kota	70	30				
									Merencanakan, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	50	50				
									Merencanakan DED, Spesifikasi pekerjaan dan RAB		100				
									Monitoring Pekerjaan dan Pelaporan		100				
									Menyusun laporan kegiatan		100				
	4 Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)	Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan	rekomendasi	20				20	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Perikanan Tangkap	
									Melakukan verifikasi dan koordinasi lokasi di Kab/Kota		100				
									Mengeluarkan Rekomendasi izin		50	50			
									Menyusun laporan kegiatan				100		
	5 Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Unit	115	30	30	30	25	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				Bidang Perikanan Tangkap	
									Melakukan survey dan identifikasi lokasi	100					
									Merencanakan, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	50					
									Melakukan Persiapan lelang pekerjaan		50	75	100		
									Melelang perkerjaan		100				
									Melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan		50	75	100		
									Memonitoring Pekerjaan dan Pelaporan		50	75	100		
									Melakukan Serah Terima Pekerjaan		50	75	100		
									Menyusun laporan kegiatan				100		
	2 Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa,dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	**Persentase peningkatan produksi nelayan perairan umum daratan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan**	**%**	**10**	**-**	**-**	**-**	**10**						Bidang Perikanan Tangkap	

	1	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	**24**	6	6	6	6	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Perikanan Tangkap	
										Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
										Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	50	50				
										Melakukan verifikasi dan koordinasi lokasi di Kab/Kota	60	40				
										Merencanakan, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	30	70				
										Melakukan Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja		60	40			
										Pelaksanaan pengadaan barang			60	40		
										Memonitoring Pekerjaan dan Pelaporan		30	70			
										Melakukan Penyerahan barang kepada kelompok penerima			50	50		
										Menyusun laporan kegiatan		50		50		
	3	**Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**Persentase kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 yang terbit izin usahanya**	**%**	**40**				**40**						Bidang Perikanan Tangkap	
		1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	Dok	1	-	-	-	1	Menyusun TOR dan KAK	100					
										Penyusunan laporan kegiatan				100		
	4	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampaidengan 10 Gt Di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Airlainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Tanda Daftar Kapal perikanan yang terbit berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**%**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**						Bidang Perikanan Tangkap	
		1 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dok	1,729	432.00	432.00	432.00	433.00	Menyusun TOR dan KAK	100					
										Penyusunan laporan hasil kegiatan				100		
	5	**Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Persentase pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional**	**%**	**36.84**	**-**	**-**	**-**	**36.84**						Perikanan Tangkap, CDK Wil.1 dan 2	
		1 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan	7	-		-	7	Menyusun TOR dan KAK	100					
										Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
										Melakukan survey dan identifikasi lokasi	40	60				
										Penyusunan laporan hasil kegiatan		100				
		2 penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang tersedia	unit	7	-	-	-	7	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
										Merencanakan DED, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	100					
										Melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan		100	100	100		
										Memonitoring Pekerjaan dan Pelaporan		25	50	100		
										Menyusun laporan kegiatan				100		
		3 Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	layanan	19	1	1	1	16	Kelengkapan dokumen kapal yg masih berlaku sebagai syarat penerbitan SPB	25	50	75	100		
										Pemeriksaan Dokumen Kapal perikanan oleh syahbandar perikanan	25	50	75	100		
										Penerbitan SPB (surat persetujuan berlayar) oleh syahbandar perikanan	25	50	75	100		
	6	**PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT**	Persentase Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar dan memiliki ijin usaha	%												
		1 Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	1,260	315	315	315	315	Menyusun TOR dan KAK	100					
										Penyusunan laporan hasil kegiatan				100		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5,177,478	1,294,369	1,294,369	1,294,369	1,294,369						Bidang Budidaya	
	1	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut**	**Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan di laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan**	**%**	**29**	**-**	**-**	**14**	**15**						Bidang Budidaya	
		1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	unit	554	-	184	184	186	Penyusunan KAK dan RAB	100					
										Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
										Verifikasi Berkas CPCL	100					
										Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	100					
										Melakukan verifikasi dan koordinasi lokasi di Kab/Kota	100				Bidang Budidaya	
										Proses barang dan jasa (LPSE)	100					

											Melakukan Penyerahan barang kepada kelompok penerima	30	30	30	10		
											Monitoring Pekerjaan dan Pelaporan				100		
											Laporan hasil kegiatan				100		
	2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	unit	3	-	1	1	1	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				Budidaya dan PBAPL	
										Proses barang dan jasa (LPSE)	100					
										Serah terima benih dan pakan		100				
										Pelaksanaan operasional budidaya KIA		100				
										Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan		100				
	3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut danLintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	1	-	1	-	-	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				PBAPL	
										Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	100					
										Pengadaan bahan uji		100				
										Monitoring lingkungan tambak dan residu		100				
										Menyusun laporan kegiatan		100				
	4	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	org	40	-	20	20		Melakukan persiapan		50	50		Bidang Budidaya	
										Melakukan Perencanaan Pembinaan dan Pemantauan Ikan di Kawasan konservasi			100			
										Laporan hasil kegiatan			100			
	5	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit	1				1	Melakukan persiapan			100		Bidang Budidaya	
										Menyusun laporan kegiatan				100		
	6	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1				1	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				Budidaya dan PBAPL	
										Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota		100				
										Menyusun laporan kegiatan				100		
	2	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat**	**Persentase pemanfaatan sarana pembudidaya ikan di perairan darat**	**%**	**30**	**-**	**-**	**10**	**20**						Budidaya dan PBAPL	
	1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	-	-	-	1	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
										Melakukan verifikasi dan koordinasi lokasi di Kab/Kota	100				PBAPL	
										Proses barang dan jasa (LPSE)	100					
										Memonitoring perkembangan budidaya			100			
										Menyusun laporan kegiatan			100			
	2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	unit	3	-	1	1	1	Peyusunan KAK dan RAB	100					
										Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
										Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	100					
										Verifikasi Berkas CPCL	100				Budidaya dan PBAPL	
										Verifikasi Lapangan CPCL		100				
										Proses barang dan jasa (LPSE)		100				
										Pelaksanaan Penyerahan paket bantuan		40	40	20		
										Monitoring Pekerjaan dan Pelaporan				100		
										Laporan hasil kegiatan				100		
3	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	6,771.50	1,693	1,693	1,693	1,693							
			Nilai Ekonomi Hasil Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan)	Rp.T	33.20	8.30	8.30	8.30	8.30							
			Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan	%	85.00	21.00	21.00	21.00	22.00						Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	1	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**%**	**100**	**-**	**-**	**-**	**100**							
	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dok	1	-	-	-	1	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
										Identifikasi kelompok penerima paket	100					
										Preses Barang dan Jasa (LPSE)		100				
										Mendistribukan dan serah terima sarana inovasi pengolahan				100		
										Menyusun laporan kegiatan				100		

2	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Persentase produksi UPI yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan**	**%**	**70**	**-**	**-**	**40**	**60**							
	1 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	5	-		-	5	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Budidaya dan Daya Saing	
									Persiapan lelang pekerjaan	25	25	25	25		
									Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan	25	25	25	25		
									Penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
	2 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	3	-	-	-	3	Menyusun TOR dan KAK	100				BPMPP	
									Persiapan lelang pekerjaan	25	25	25	25		
									Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan	25	25	25	25		
									Penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
	3 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Persentase ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi**	**%**	**100**	**-**	**-**	**-**	**100**							
	1 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dok	1	-	-		1	Menyusun TOR dan KAK	100	-		-	Bidang Budidaya dan Daya Saing	
									Penyusunan laporan kegiatan				100		
	2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	Ton	0.02				0.02	Menyusun TOR dan KAK	100					
									Persiapan lelang pekerjaan	25	25	25	25		
									Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan	25	25	25	25		
									Penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
	3 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	Sistem informasi	1	-	-	-	1	Menyusun TOR dan KAK	100	-		-	Bidang Budidaya dan Daya Saing	
									Penyusunan laporan kegiatan				100		
Sasaran 2: Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikana		Luas kawasan konservasi perairan yang ditetapkan dan yang efektif dikelola	Ha	**847,058.22**				**847,058.22**							
		persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan perundangan yang berlaku	%	**84**				**84**							
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan	%	66.93	-	-	-	66.93						Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	1 Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi	**Persentase kawasan konservasi yang dikelola**	**%**	**68.05**	-	-	-	**68.05**							
	1 Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulaupulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dok	1	-	-	-	1	Melakukan persiapan kegiatan	50	50			Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
									Pengumpulan bahan capaian kinerja dari unit kerja		100				
									Menerima bahan verifikasi			100			
									Laporan hasil kegiatan			50	50		
	2 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	63,447.23	-	-	-	63,447.23	Menyusun TOR, KAK dan Spesifikasi Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		100			Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
									Proses barang dan jasa (LPSE)		100				
									Melakukan persiapan kegiatan		100				
									Laporan hasil kegiatan			100			
	3 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	43.60	-	1.60	19.85	22.15	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				CDK Selayar, Ajatapareng,Bosowasi, Luwu Raya, Maminasata, Pangkep, Wilsel	
									Melakukan survey dan identifikasi lokasi	50	50				
									Perencanaan sarana inovasi teknologi, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	50	50				
									Proses barang dan jasa (LPSE)	50	50				
									Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan		50	50			
									Melakukan Serah Terima Pekerjaan		50	25	25		
									Laporan hasil kegiatan				100		

	4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait MitigasiBencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilavah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Org	100	-	-	-	100	Menyusun TOR dan KAK			100		Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
										Pemilihan tempat pertemuan fullboard				100		
										Laporan hasil kegiatan				100		
	5	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dok	1	-	-	-	1	Menyusun TOR dan KAK			100		Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
										Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan				100		
										Laporan hasil kegiatan				100		
	6	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku usaha	30				30	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
										Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan		50	50			
										Laporan hasil kegiatan				100		
	7	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dok	1				1	Menyusun TOR dan KAK			100		Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
										Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan				100		
										Laporan hasil kegiatan				100		
	8	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok Masyarakat	7				7	Menyusun TOR dan KAK			100		Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
										Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan				100		
										Laporan hasil kegiatan				100		
	9	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok	3				3	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
										Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan		50	50			
										Laporan hasil kegiatan				100		
	10	Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	Ton	49,922				49,922	Menyusun TOR dan KAK			100		Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
										Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan				100		
										Laporan hasil kegiatan				100		
	11	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	Dok	1				1	Menyusun TOR dan KAK			100		Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
										Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan				100		
										Laporan hasil kegiatan				100		
2	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawah 12 Mil Diluar Minyak Dan Gas Bumi**		**Persentase dokumen izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar Minyak dan gas bumi yang diterbitkan**	**%**	**100**	25	25	25	25						Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	1	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dok	1	-	-	1	-	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan	100					
										Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
	2	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dok	12	3	3	3	3	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan	100					
										Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
3	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**		**Jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang aktif dalam pengelolaan SD kelautan dan perikanan**	**org**	**780**	-	-	390	390						Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Bosowasi	
	1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	org	600	-	-	300	300	Peyusunan KAK dan RAB	50	50				
										Proses barang dan jasa (LPSE)		100				
										Melakukan persiapan kegiatan		50	50			
										Monitoring Pekerjaan dan Pelaporan			100			
										Laporan hasil kegiatan				100		
	2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan KelembagaanMasyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	klp	1	-	-	-	1	Belanja ATK		50	50		Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
										Pelaksanaan Perjalanan Dinas		40	50	10		
	3	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses IlmuPengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	klp	10	-	-	5	5	Peyusunan KAK dan RAB		100			Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
										Proses barang dan jasa (LPSE)		100				

											Pelaksanaan pertemuan		50	50				
											Laporan hasil kegiatan				100			
	4	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit	2				2	Penyusunan KAK dan RAB	100					Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
											Proses barang dan jasa (LPSE)		100					
											Pelaksanaan Kegiatan			100				
											Laporan hasil kegiatan				100			
	5	Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	Unit Usaha	7			3	4	Penyusunan KAK dan RAB			100		Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
											Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan				100			
											Laporan hasil kegiatan				100			
	6	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit	1				1	Penyusunan KAK dan RAB	100					Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
											Proses barang dan jasa (LPSE)		100					
											Pelaksanaan Kegiatan			100				
											Laporan hasil kegiatan				100			
5	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	%	100		8		92							Bidang Pengawasan		
	1	**Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**%**	**100**	**-**	**11**	**-**	**89**									
		1	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	14	-	-	-	14	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan		
											Penyusunan Petunjuk Teknis	100						
											Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25			
											Melakukan Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja	25	25	25	25			
											Belanja ATK		50	50				
											Pelaksanaan pertemuan		100					
											Pelaksanaan Perjalanan Dinas	20	30	25	25			
											Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	20	30	25	25			
											Laporan hasil kegiatan				100			
		2	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Perkara	1				1	Menyusun TOR dan KAK	100						
											Penyusunan Petunjuk Teknis		100					
											Pelaksanaan Kegiatan			50	50			
											Laporan hasil kegiatan				100			
		3	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	93	23	23	23	24	Menyusun TOR dan KAK	100						
											Penyusunan Petunjuk Teknis		100					
											Pelaksanaan Kegiatan		30	40	30			
											Laporan hasil kegiatan				100			
		4	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	unit	5	1	1	1	2	Menyusun TOR dan KAK	100						
											Pelaksanaan Kegiatan		50	50				
											Laporan hasil kegiatan				100			
		5	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	350	88	88	88	86	Menyusun TOR dan KAK	100						
											Melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan	25	25	25	25			
											Menginventarisasi data dan lokasi IUU Fishing sesuai pemetaan	25	25	25	25			
											Koordinasi dengan DKP Prov, Polairud dan Pokmaswas terkait kegiatan pengawasan dan pemantauan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan	25	25	25	25			
											Menyusun daftar rencana patroli lokasi IUU Fishing dam biota laut yang dilindungi	25	25	25	25			
											Melakukan patroli bersama	25	25	25	25			
											Monitoring dan evaluasi	25	25	25	25			
											Penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25			
		6	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	114	28	28	28	30	Menyusun TOR dan KAK	100						
											Melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan	100						
											Menginventarisasi data dan lokasi IUU Fishing	100					CDK Selayar, Ajatapareng Bosowa	

										Koordinasi dengan DKP Prov, Polairud dan Pokmaswas terkait kegiatan pengawasan dan pemantauan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan	25	25	25	25	Ajatappareng,Bosowasi, Luwu Raya, Maminasata, Pangkep, Wilsel	
										Menyusun daftar lokasi IUU Fishing dan pelayanan rekomendasi izin usaha	25	25	25	25		
										Menyusun daftar rencana patroli lokasi IUU Fishing dam biota laut yang dilindungi	25	25	25	25		
										Melakukan Patroli/ Pengawasa	25	25	25	25		
										Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
	7	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Klp Masyarakat	3	-	-	-	3	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan	
										Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
										Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25		
										Melakukan Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja	25	25	25	25		
										Belanja ATK	100					
										Pelaksanaan Perjalanan Dinas	25	25	25	25		
										Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	25	25	25	25		
										Laporan hasil kegiatan				100		
	8	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Forum	1	-	-	-	1	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan	
										Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
										Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25		
										Melakukan Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja	25	25	25	25		
										Belanja ATK				100		
										Pelaksanaan pertemuan				100		
										Pelaksanaan Perjalanan Dinas	35	50	15			
										Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	35	50	15			
										Laporan hasil kegiatan				100		
	2	**Pengawasan Sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan lintas kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi**	**Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**%**	**100**	**-**	**-**	**-**	**100**							
		1	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	8	2	2	2	2	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan	
										Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
										Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25		
										Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	25	25	25	25		
										Belanja ATK			100			
										Pelaksanaan Perjalanan Dinas	50		50			
										Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	50		50			
										Laporan hasil kegiatan				100		
		2	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	6	-	2	2	2	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan	
										Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
										Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25		
										Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	25	25	25	25		
										Belanja ATK			100			
										Pelaksanaan Perjalanan Dinas		50	50			
										Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas		50	50			
										Laporan hasil kegiatan				100		
		3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil PerikananLintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	12	3	3	3	3	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan	
										Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
										Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25		
										Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja	25	25	25	25		
										Belanja ATK	100					
										Pelaksanaan Perjalanan Dinas	30	30	30	10		
										Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	30	30	30	10		
										Laporan hasil kegiatan				100		
	Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	**90.00**				**90.00**							
	6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	%	100.0	34.86	25.59	27.96	11.59							

1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**33**	**13**	**33**	**20**								
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	-	1	-	1	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100				Sub Bagian Program	
										Pelaksanaan Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan sinkronisasi perencanaan	100					
										Pengumpulan Bahan perencanaan	100					
										Penyusunan dokumen Renstra, stunting dan kemiskinan	100					
										Penyusunan renja pokok 2025 dan GBS		100				
										Penyusunan renja perubahan 2024			100			
										Penyusunan laporan hasil kegiatan		100				
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	-	-	-	1	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100					
										menyusun standar satuan harga dan bagan satuan standar	50	50				
										mengumpulkan dan analisa usulan hasil pokok pikir dan musrembang		100				
										penyusunan dokumen rancangan awal RKA berdasarkan KUAPPAS		100				
										penyusunan RKA berdasarkan R APBD		100				
										Penyesuain RKA berdasarkan evaluasi			100			
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-	-	1	-	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)		100				
										menyusun standar satuan harga dan bagan satuan standar		100				
										analisa capaian kinerja sampai dengan triwulan 2 dan laporan prognosis keuangan		100				
										penyusunan dokumen rancangan awal RKA perubahan berdasarkan KUAPPAS perubahan			100			
										Penyusunan RKA perubahan berdasarkan R APBD perubahan			100			
										Penyesuain RKA berdasarkan evaluasi				100		
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100					
										penandatangan dan pengesahan DPA 2024	100					
										validasi tingkat kepala OPD, tingkat BUD DPA 2025				100		
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	-	-	1		Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100					
										Validasi tingkat kepala OPD, tingkat BUD DPA perubahan 2023				100		
										Penandatangan dan pengesahan DPA perubahan 2024				100		
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	3	-	3	-	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100					
										pengumpulann data capaian kinerja	30	100	100	100		
										koordinasi dalam rangka penyusunan laporan kinerja	25	50	75	100		
										penyusunan laporan capaian kinerja	80	100	100	100		
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	1	1	1	1	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100					
										pengumpulan data evaluasi kinerja	8	8	8	100		
										koordinasi dalam rangka penyusunan laporan kinerja	25	50	75	100		
										penyusunan laporan capaian kinerja	67	67	75	100		
	8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	4	1	1	1	1	Menyusun TOR dan KAK	100					
										Koordinasi dengan kab/kota	100					
										Pelaksanaan kegiatan	25	25	25	25		
										Laporan hasil kegiatan				100		
	9	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalamRangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita acara	1				1	Menyusun TOR dan KAK	100					
										Persiapan pelaksanaan	100					
										Pelaksanaan kegiatan pertemuan	100					
										Laporan hasil kegiatan		100				
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan**	**%**	**100**	**25.00**	**25.00**	**25.00**	**25.00**								
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org	315	-	-	-	315	Menyusun TOR dan KAK	100					
										Melakukan analisis dan perhitungan gaji dan tunjangan ASN	100					

										Melakukan penginputan data gaji dan tunjangan ASN pada aplikasi	25	25	25	25		
										Cetak laporan gaji dan tunjangan	25	25	25	25		
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verrfikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dok	12	3	3	3	3	Melakukan persiapan	100					
										Menerima bahan verifikasi	10	30	30	30		
										Melakukan analisis dan verifikasi keuangan SKPD sesuai aturan yang berlaku	10	30	30	30		
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dok	12	3	3	3	3	Melakukan persiapan	100					
										Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
										Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	-	-	-	1	Melakukan persiapan	100					
										Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100				Sub Bagian Keuangan	
										Pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir				100		
										Penyusunan laporan keuangan akhir				100		
	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dok	2	-	-	1	1	Melakukan persiapan	100					
										Penyusunan laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		50		50		
										Laporan hasil kegiatan		50		50		
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	5	5	4	4	Melakukan persiapan	100					
										Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	100					
										Pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	25	25	25	25		
										Menyusun laporan kegiatan	25	25	25	25		
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	-	-	-	1	Melakukan persiapan	100					
										Penyusunan Dokumen	25	25	25	25		
										Laporan hasil kegiatan				100		
	3	**Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik**	**%**	**100**	**-**	**50**	**50**								
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	dok	1	-	1	-	-	Menyusun TOR, KAK dan Spesifikasi penyediaan Barang Cetakan Kantor		100				
										Melakukan persiapan pengadaan		100				
										Mengusulkan pengadaan barang		100				
										Pelaksanaan pengadaan barang		100				
										Menerima barang Cetakan Kantor		100				
										Mendistribusikan Barang Cetakan Kantor		100				
	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	dok	1	-	1	-	-	Menyusun TOR, KAK dan Spsifikasi pengadaan belanja modal pagar		100				
										Melakukan persiapan pengadaan		100				
										Mengusulkan pengadaan barang		100				
										Pelaksanaan pengadaan barang		100			UKH	
										Menerima barang Pengadaan belanja modal pagar		100				
										Mendistribusikan Pengadaan belanja modal pagar		100				
										Melakukan persiapan	100					
	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1				1	Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	100					
										Laporan hasil kegiatan				100		
	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	-	-	2	-	Melakukan persiapan	100					
										Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	100					
										Laporan hasil kegiatan	50	50				
	4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian target pendapatan perangkat daerah**	**%**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**							
	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	dok	1	1	-	-	-	Melakukan persiapan	100					
										Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
	2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	dok	1				1	Melakukan persiapan	100				Sub Bagian Keuangan	
										pelaksanaan kegiatan	25	25	25	25		
										Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
	5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**							
	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	1		1		-	Melakukan persiapan	100					
										Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
										Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		

2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	12	3	3	3	3	Menyusun TOR dan KAK	100				UKH	
									Pembentukan Tim Pendataan Adminstrasi Kepegawaian	25	25	25	25		
									Pengumpulan bahan laporan	25	25	25	25		
									Melakukan verifikasi data	25	25	25	25		
									Penyusunan laporan Pendataan Adminstrasi Kepegawaian	25	25	25	25		
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	12	3	3	3	3	Menyusun TOR dan KAK	100					
									Pembentukan Tim Data Sistem Informasi Kepegawaian	25	25	25	25		
									Pengumpulan bahan laporan	25	25	25	25		
									Melakukan verifikasi data	25	25	25	25		
									Penyusunan laporan Data Sistem Informasi Kepegawaian	25	25	25	25		
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12	3	3	3	3	Menyusun TOR dan KAK	100					
									Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25	25	25	25		
									Pengumpulan bahan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25	25	25	25		
									Melakukan verifikasi bahan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25	25	25	25		
									Penyusunan laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25	25	25	25		
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	1	1			Menyusun TOR dan KAK	100					
									Melakukan Persiapan	100					
									pelaksaaan kegiatan			50	50		
									Laporan hasil kegiatan				100		
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan layanan umum kantor**	**%**	**100**	**64.29**	**21.43**	**7.14**	**7.14**							
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	5				Menyusun TOR, KAK dan Spesifikasi Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
									Melakukan persiapan pengadaan	100					
									Mengusulkan pengadaan barang	100					
									Pelaksanaan pengadaan barang	100					
									Menerima barang perlengkapan dan peralatan kantor	100					
									Mendistribusikan peralatan dan perlengkapan kantor	100					
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	3	-	-	3	Menyusun TOR, KAK dan Spesifikasi Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	100					
									Melakukan persiapan pengadaan	100					
									Mengusulkan pengadaan barang	100					
									Pelaksanaan pengadaan barang	100					
									Menerima barang perlengkapan dan peralatan kantor	50	50				
									Mendistribusikan peralatan dan perlengkapan kantor	50	50				
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	1	-	-	-	Melakukan persiapan	100					
									Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	100					
									Menyusun rencana pemeliharaan	100					
									Menyusun TOR, KAK dan Spsifikasi penyediaan Peralatan rumah tangga	100					
									Menerima barang Peralatan rumah tangga	50	50				
									Mendistribusikan Peralatan rumah tangga	50	50				
									Laporan hasil kegiatan	50	50				
4	Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	3	2	-	-	1	Menyusun TOR, KAK dan Spesifikasi penyediaan Barang Cetakan Kantor	100					
									Melakukan persiapan pengadaan	100					
									Mengusulkan pengadaan barang	100					
									Pelaksanaan pengadaan barang	100					
									Menerima barang Cetakan Kantor	25	25	25	25		
									Mendistribusikan Barang Cetakan Kantor	25	25	25	25		
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	3	3	3	3	Melakukan persiapan	100					
									Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
									Proses barang dan jasa (LPSE)	25	25	25	25		
									Menyusun laporan kegiatan	25	25	25	25		
									Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	3	3	3	3	Melakukan persiapan	25	50	75	100		
									Mnevusun rencana kebutuhan	100					
									Menyiapakan administrasi dan surat tugas	100					

										Pelaksanaan Perjalanan Dinas	25	25	25	25		
										Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	25	25	25	25		
	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausaaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	1	-	1	-	-	Melakukan persiapan	100				UKH	
										Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	100					
										Laporan hasil kegiatan	100					
	7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaaan BMD**	**%**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**							
		1 pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	paket	2	-	-	2	-	Menyusun TOR, KAK dan Spsifikasi pengadaan mebel	100				UKH, CDK	
										Melakukan persiapan pengadaan	100					
										Mengusulkan pengadaan barang	100					
										Pelaksanaan pengadaan barang	100					
										Menerima barang Pengadaan mebel	100					
										Mendistribusikan Pengadaan mebel	100					
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	1	1		Menyusun TOR, KAK dan Spsifikasi pengadaan mebel	100					
										Melakukan persiapan pengadaan	100					
										Mengusulkan pengadaan barang	100					
										Pelaksanaan pengadaan barang						
										Menerima barang Pengadaan						
										Mendistribusikan Pengadaan						
		3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	2	2	2	1	Menyusun TOR, KAK dan Spsifikasi pengadaan mebel	100					
										Melakukan persiapan	100					
										Pelaksanaan pengadaan	25	25	25	25		
										Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
	8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah**	**%**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**							
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	3	3	3	3	Melakukan analisis dan perhitungan biaya tagihan telepon, air dan listrik	100					
										Melakukan penginputan biaya tagihan telepon, air dan listrik	25	25	25	25		
										Membuat Laporan biaya rekening listrik dan air bersih	25	25	25	25		
										Menyelesaikan biaya rekening listrik dan air bersih	25	25	25	25		
		2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	3	3	3	3	Melakukan persiapan	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
										Penyusunan rencana pemeliharaan	100					
										Monitoring Pekerjaan dan Pelaporan	25	25	25	25		
										Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	4	-	-	2	2	Mengumpulkan berkas Jasa Pelayanan Umum Kantor	100					
										Menempatkan tenaga di masing-masing unit kerja	100					
										Memonitoring pekerjaan dan pelaporan	25	25	25	25		
										Menyusun Laporan Kegiatan	25	25	25	25		
										Melakukan pembayaran honorarium jasa pelayanan Umum Kantor	25	25	25	25		
	9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya BMD**	**%**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**							
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara danDibayarkan Pajaknya	Unit	17	5	5	4	3	Melakukan persiapan	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
										Penyusunan rencana pemeliharaan	100					
										Melakukan pemeliharaan secara berkala sesuai daftar pemeliharaan barang	25	25	25	25		
										Penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajakdan Perizinannya	Unit	16	4	4	4	4	Melakukan persiapan	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
										Menyusun rencana pemeliharaan	100					
										Melakukan pemeliharaan secara berkala sesuai daftar pemeliharaan barang suku cadang Kendaraan Dinas operasional	20	30	50			
										Laporan hasil kegiatan				100		
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	10	3	3	3	1	Menyusun rencana pemeliharaan	100					
										Melakukan pemeliharaan secara berkala sesuai daftar pemeliharaan barang	100					
										Laporan hasil kegiatan	20	30	50			
														100		
		4 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1	-	-	-	1	Melakukan persiapan	100					
										Proses barang dan jasa (LPSE)		100				
										Laporan hasil kegiatan		90	10			

			5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bagunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	-	1		1	Melakukan persiapan	100					
												Proses barang dan jasa (LPSE)	100				UKH	
												Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
												Penyusunan KAK dan RAB	25	25	25	25		
												Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
			6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-			1	Penyusunan rencana pemeliharaan	100					
												Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja	100					
												Melakukan pemeliharaan secara berkala sesuai daftar pemeliharaan barang		50	50			
												Berita acara hasil pemeliharaan		50	50			

Makassar, Januari 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan

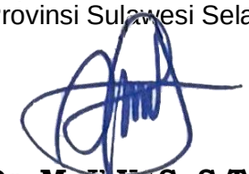
Dr. M. ILYAS, S.T., M.Si.Sc
Nip. 19700606 199603 1

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Laporan Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas Evalausi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Dokumen ini disusun untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, dan sebagai dasar evaluasi dan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2026.

Dengan tersusunnya Evaluasi Rencana Aksi ini pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ini, diharapkan setiap unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dapat berkomitmen dan konsisten terhadap perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Makassar, Januari 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan



Dr. M. ILYAS, S.T, M.Sc

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		***ii***
Daftar Isi		***iii***
BAB I.	**PENDAHULUAN**	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	1
1.3.	Maksud dan Tujuan	2
1.4.	Ruang Lingkup	3
1.5.	Struktur Organisasi	3
BAB II.	**TELAAHAN VISI MISI KEPALA DAERAH**	
2.1.	Visi dan Misi	6
BAB III.	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**	
3.1.	Tujuan dan Sasaran	8
3.2.	Program dan Kegiatan	9
3.3.	Evaluasi Rencana Aksi	11
BAB IV.	**PENUTUP**	16

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Aksi sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Aksi Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2022 – 2026, Renja Tahun 2026 dan untuk anggaran disusun berdasarkan DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 , serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Rencana Aksi juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan setiap Program / Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan pada Tahun 2026. Dengan berdasarkan pada Rencana Aksi yang tersusun secara baik dan sistematis, dapat meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Aksi merupakan proses penyusunan yang menjabarkan dari Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Aksi dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam Tahun 2023. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja, kegiatan - kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 adalah target Kinerja yang ditetapkan dari capaian indikator kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Tersedianya dokumen Rencana Aksi dalam melaksanakan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2026.
2. Menyajikan informasi pelaksanaan program kegiatan per triwulan dan bahan evaluasi dalam pencapaian kinerja.

Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi atas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah :

1. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi ;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public ;
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Pemerintah;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah;
4. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

6. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 meliputi Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator serta Realisasi Anggaran dan Kinerja.

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 maka Rancangan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

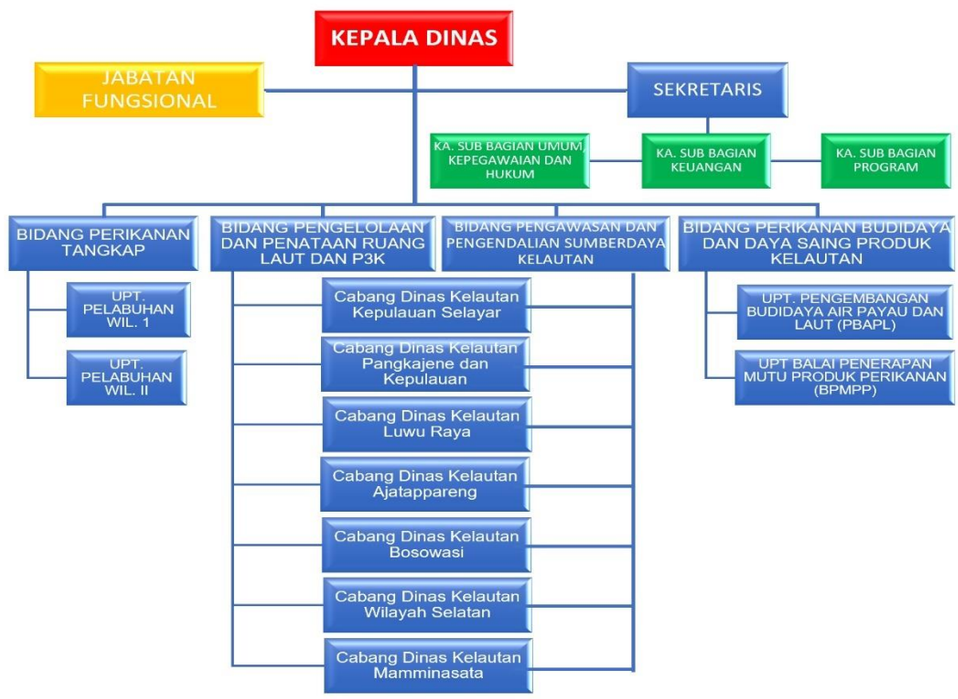
1. Kepala Dinas (Eselon II);
2. Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian (Terdiri Eselon III dan Eselon IV) ;
   Terdiri dari :
   a. Kasubag Program
   b. Kasubag Umum
   c. Kasubag Keuangan
3. Bidang Teknis sebanyak 4 Unit (hanya Eselon III) ;
   Terdiri dari :
   a. Bidang Perikanan Tangkap
   b. Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
   c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
   d. Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Perikanan
4. UPT sebanyak 4 unit dengan membawahi 1 Bagian Tata Usaha dan 2 Unit Seksi (Terdiri Eselon III dan Eselon IV) ;
   a. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1, terdiri dari :
      - Kasubag Tata Usaha
      - Kasie Tata Kelola Pelabuhan
      - Kasie Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
   b. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 2
      - Kasubag Tata Usaha
      - Kasie Tata Kelola Pelabuhan
      - Kasie Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
   c. UPT BPAPL Bojo
      - Kasubag Tata Usaha
      - Kasie Produksi
      - Kasie Pelayanan Teknologi dan Kesehatan Lingkungan
   d. UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan :
      - Kasubag Tata Usaha

- Kasie Pengembangan Produk
- Kasie Pengujian

5. Kepala CDK sebanyak 7 unit dengan membawahi 1 Bagian Tata Usaha dan 2 Unit Seksi (Terdiri Eselon III dan Eselon IV), terdiri dari :
   a. Kasubag Tata Usaha
   b. Kasie Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan
   c. Kasie Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Tabel 1. Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat / Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol.	Jumlah Pejabat Struktural	Fungsional
ASN : 170	S3 : 5	IV/e : 0	Es. II : 1	4
PPPK : 139	S2 : 60	IV/d : 0	Es. III : 11	
	S1 : 86	IV/c : 1	Es. IV : 31	
	DIII : 2	IV/b : 7		
	DII : 1	IV/a : 40		
	SMA : 15	III/d : 71		
	SMP : 0	III/c : 16		
	SD : 1	III/b : 11		
		III/a : 16		
		II/d : 4		
		II/c : 1		
		II/b : 1		
		II/a : 1		
		I/d : 0		
		I/c : 1		
		I/b : 0		
		I/a : 0		
Jumlah PNS	P**NS = 170**			



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 2. Bagan Alur Penyusunan Rencana Aksi

BAB II. TELAAHAN VISI MISI KEPALA DAERAH

2.1. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan maka untuk mengevaluasi Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan maka dapat diketahui dengan melihat indicator-indikator yang terkait dengan Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah **Sulawesi Selatan maju dan Berkarakter** untuk mewujudkan Visi maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 2 Misi yaitu :

a. Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sektor kelautan dan perikanan**.**
b. Misi 5 : Mendorong inovasi teknologi, pengolahan hasil laut, dan pemasaran produk untuk meningkatkan daya saing

Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Sulawesi Selatan maju dan Berkarakter, dengan Misi yang diamanahkan adalah Misi ke - 1 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sektor kelautan dan perikanan dan Misi ke – 5 yaitu Mendorong inovasi teknologi, pengolahan hasil laut, dan pemasaran produk untuk meningkatkan daya saing. Dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran di atas tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Hasil identifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan tentang factor-factor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatanakan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan factor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan maka Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan Program Prioritas dan Program Pendukung pada Tahun 2026 yang diwujudkan melalui Laporan Evaluasi Rencana Aksi.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut di atas, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2028 sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Tujuan, Sasaran dan Program

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -			
			2025	2026	2027	2028
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8
1	**Tujuan :** **Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan**	Laju Pertumbuhan PDRB Perikanan	5,3	5,6	5,9	6,2
1.1	**Sasaran 1 :** **Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan**	Jumlah produksi perikanan (ton)	5.450.079.6	5.709.493.06	5.982.776.12	6.268.853.74
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	115,3	118,7	122,3	126
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	109,83	112,90	116,06	119,31
		Angka konsumsi ikan	73.50	74.70	75.90	77.10
1.2	**Sasaran 2 :** **Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan**	Luas kawasan konservasi perairan yang ditetapkan dan yang efektif dikelola (Ha)	829.561,63	847.058,22	847.122.4	847.122.4
		persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan perundangan yang berlaku (%)	82	84	87	89
1.3	**Sasaran 3 :** **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	88,00	90,00	92,00	94,00

3.2. Program dan Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan sebanyak 6 Program yang terdiri 25 Kegiatan Pada Tahun 2026 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

   Pada program ini terdapat 9 Kegiatan yaitu :

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

   Pada program ini terdapat 3 Kegiatan yaitu :

   a. Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi.
   b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.
   c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

   Pada program ini terdapat 6 Kegiatan yaitu :

   a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil
   b. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa,dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
   c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
   d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampaidengan 10 Gt Di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Airlainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
   e. Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan pelabuhan Perikanan Provinsi
   f. Pendaftaran Kapal Perikanan Di Atas 10 Gt Sampai Dengan 30 Gt

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

   Pada Program ini terdapat 2 Kegiatan yaitu :

   a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
   b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

   Pada Program ini terdapat 2 Kegiatan :

   a. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.
   b. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

   Pada Program ini terdapat 3 Kegiatan yaitu :

   a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
   b. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
   c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

3.3. Evaluasi Rencana Aksi

Rencana Aksi Tahun 2026 dapat dijelaskan melalui uraian di bawah ini :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Tahun 2026 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 31.221.022.687,05.- Sasaran program meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator program yaitu : Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi

pada Sub Kegiatan yang ada di program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalamRangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verrfikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, pengadaan mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pada Tahun 2026 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.810.810.715,00,- Sasaran program Meningkatnya Kelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam Kelautan dan Perikanan, dengan indikator program yaitu : Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan

Pada Sub Kegiatan yang ada di Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan pulau-pulau Kecil yaitu : Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulaupulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/, Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat, Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir, Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru, Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem

Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan, Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon, Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam, Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat, Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman, Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha, Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil, Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman, Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha, Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Pada Tahun 2026 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 42.404.566.790,00,- dan Sasaran program Meningkatnya Kelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam Kelautan dan Perikanan, dengan indikator program yaitu : Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Sub kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yaitu : Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi, Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi, Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi, Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi, Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah, Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi, Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi, Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil PerikananLintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

d. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pada Tahun 2026 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.442.264.326,05,- Sasaran program Meningkatnya Produksi Perikanan dengan menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi, dengan indikator program yaitu : Produksi Perikanan Tangkap

Sub Kegiatan pada Bidang Perikanan Tangkap Yaitu : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR), Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur, Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil, Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT, Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan, penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan, Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP).

e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada Tahun 2026 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 806.979.300,00- dengan sasaran program Meningkatnya Produksi Perikanan dengan menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi, dengan indikator program yaitu : Produksi Perikanan Budidaya

Berdasarkan di atas, sub kegiatan dari bidang budidaya yaitu : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut, Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut danLintas Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

f. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pada Tahun 2026 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.030.601.223,00,- Sasaran program Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dengan indikator program yaitu : (1) Produksi Olahan Ikan, (2 Nilai Ekonomi Hasil Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan). 3) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan

Sub kegiatan pada pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yaitu : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing, Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir.

BAB IV. P E N U T U P

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2026 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/ kegiatan yang tercantum pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung setiap pelaksanaan program/ kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/ hambatan yang timbul. Dengan tersusunnya laporan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Kegiatan yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada input, proses dan output. Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Laporan Evaluasi Rencana Aksi ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.